DAFTAR PUSTAKA

Buku

Hamzah, A. (2017). *Hukum acara pidana Indonesia* (Cet. ke-10). Jakarta: Sinar Grafika.

Harahap, M. Y. (2009). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP: Penyidikan dan penuntutan* (Cet. ke-11). Jakarta: Sinar Grafika.

Hiariej, E. O. S. (2012). *Teori & hukum pembuktian* (Cet. ke-1). Jakarta: Erlangga.

Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram: UPT Mataram Press University.

Reksodiputro, M. (1997). *Bunga rampai permasalahan dalam sistem peradilan pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.

Satory, A., et al. (2024). *Metode penelitian hukum*. Sukoharjo: CV Tahta Media Group.

Solikin, N. (2021). *Pengantar metodologi penelitian hukum*. Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media.

Gunardi. (2022). *Metode penelitian hukum*. Jakarta Selatan: Damera Press.

Widiarty, W. S. (2024). *Metode penelitian hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media.

Jurnal

Billa, A. S., et al. (2025). Analisis yuridis terhadap mekanisme pelaksanaan praperadilan dalam hukum acara pidana Indonesia. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, 15*(11), 7.

Christy Menoha Teslatu, L. (2019). Penetapan tersangka sebagai objek praperadilan dalam Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 sebagai pemenuhan HAM dan tercapainya sistem peradilan pidana terpadu. *Jurnal Ilmu Hukum, 2*(2), 134.

Diliyanto, D., et al. (2018). Perluasan wewenang praperadilan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. *Jurnal Ilmiah Hukum, 3*(1), 37–38.

Dwianur Sukono, S. J., & Santoso, B. (2024). Analisis efektivitas praperadilan dalam melindungi hak asasi manusia di sistem peradilan Indonesia. *Verstek, 12*(1), 69.

Fadhel Febriansyah, M., et al. (2025). Peran hakim dalam menilai bukti dalam sistem pembuktian hukum pidana Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan, 2*(1), 169.

Handoko, D., Rustam, & Marlina, T. (2021). Perkembangan politik hukum praperadilan di Indonesia. *Jurnal Trias Politika, 5*(2), 185–187. https://journal.unilak.ac.id/index.php/trias-politika/article/view/8193

Hardianta, Zulfan, & Subaidi, J. (2025). Analisis hukum terhadap kedudukan rekaman CCTV sebagai alat bukti dalam tindak pidana pembunuhan (Analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum, 8*(3), 3–11. https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/

Harefa, E. S., & Sihotang, J. (2025). Analisis yuridis terhadap permohonan praperadilan sebagai kontrol yudisial atas penetapan tersangka dalam dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan (Studi Putusan Nomor 54/Pid.Pra/2025/PN Mdn). *Jurnal Hukum, 6*(4), 1086.

Hasibuan, J. B. (2019). Kedudukan barang bukti dalam perkara pidana ditinjau berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda*, 24.

Johari. (2020). Kebenaran materiel dalam kajian hukum pidana. *Jurnal Ilmu Hukum Reusam, 8*(2), 120.

Keysha Nashwa, Ayu Lestari, Lika Mulki Latief, dan Noerma Kurnia Fajarwati. (2024). "Kepastian Hukum dan Keadilan Hukum dalam Pandangan Ilmu Komunikasi." *Jurnal Sains Student Research* 2, no. 1: 713–24. https://doi.org/10.61722/jssr.v2i1.1006

Kurniati, S. B. (2021). Tinjauan yuridis terhadap penetapan tersangka dalam perkara gugatan praperadilan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 dihubungkan dengan peran advokat Bidkum Polda Jabar. *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara, 11*(2), 177–189. https://ejournal.uninus.ac.id/index.php/MJKN

Lokas, R. (2013). Barang bukti dan alat bukti berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Lex Crimen, 11*(3), 45.

Marzuq, M. C. (2026). Peran penemuan hukum oleh hakim praperadilan dalam menentukan kepastian hukum terhadap pembuktian di Indonesia. *Jurnal Hukum Modern, 8*(1), 121.

Munawaroh, N. (2024, July 29). *Apa perbedaan alat bukti dan barang bukti?* Hukum Online.

Natsir, N. A., et al. (2026). *Res judicata pro veritate habetur* dalam perspektif kepastian hukum terhadap proses praperadilan yang memeriksa materi pokok perkara. *Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara, 4*(2).

Ramadhan, C. R. (2021). Penegakan hukum tindak pidana terhadap satwa liar. *Jurnal Yudisial, 14*(2), 214.

Ramadhan, C. R., Nur Aini, A., & Khairunisa, D. (2026). Status quo bias dalam reformasi hukum acara pidana di Indonesia: Kegagalan penguatan pengawasan pengadilan (*judicial scrutiny*) yang lebih optimal. *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies, 6*(1), 111–116. https://scholarhub.ui.ac.id/ijsls/vol6/iss1/5

Ramiyanto. (2015). Sah atau tidaknya penetapan tersangka sebagai objek gugatan praperadilan (Kajian Putusan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel). *Jurnal Yudisial, 8*(2), 168. https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/58

Sahbani, A. (2015, April 28). *MK 'Rombak' bukti permulaan dan objek praperadilan*. Hukum Online.

Sanuarija, S. (2019). Kewenangan praperadilan sebagai sarana mencari keadilan bagi tersangka dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *eL-*

Mashlahah Journal, *9*(1), 2–13. http://jurnal.uinmataram.ac.id/index.php/elmashlahah

Sari, D. K. (2015). *Analisis yuridis kedudukan hakim pemeriksa pendahuluan sebagai upaya pembaharuan lembaga praperadilan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia* [Skripsi, Universitas Brawijaya].

Sari, M. (2025). Kedudukan dan fungsi barang bukti serta alat bukti dalam proses pemeriksaan perkara pidana. *Jurnal Ilmu Hukum, 1*(1), 10.

Sholihin, A. (2026). Rekonstruksi parameter keabsahan alat bukti terbuka dalam Pasal 235 ayat (1) KUHAP. *Intelektiva*, *7*(12), 37–41. https://doi.org/10.2686/5661

Silubun, F. Y., Drupadi, C. P., Puspitasari, H. D., & Ahmad, Z. Z. P. (2026). Analisis prosedur penetapan tersangka oleh penyidik dalam perspektif praperadilan (Studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 6/Pid.Pra/2017/PN.Jap). *Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora, 1*(2), 100–105. https://ejournal.darulfaizin.or.id/index.php/jhusum

Sudarmono, B. J., Markoni, Widarto, J., & Asri, D. P. B. (2025). Analisis yuridis terhadap praperadilan berdasarkan Pasal 83 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Studi kasus Putusan Praperadilan Negeri Denpasar Perkara Nomor 20/Pid.Pra/2023/PN.Dps). *Jurnal Sosial dan Humaniora*, *2*(2), 2.

Sudirman, T., Syachdin, S., & Awaliah. (2025). Analisis yuridis pembatalan status tersangka korupsi (Studi Putusan PN Jakarta Selatan No. 2/Pid.Pra/2024/PN.Jkt.Sel). *Jurnal Ilmu Hukum Aktualita, 2*(2), 51–59. http://jurnal.fakum.untad.ac.id/index.php/AKT

Susatyo, F. A., Wahyuni, H. H., & Afda'u, F. (2026). Penguatan praperadilan sebagai perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan kewenangan dalam upaya paksa menurut KUHAP 2025. *Binamulia Hukum, 15*(1), 363–373. https://doi.org/10.37893/jbh.v15i1.1284

Toipul, Parnomo, B., & Afandi. (2022). Analisis yuridis terhadap alat bukti yang diperoleh secara tidak sah dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Dinamika, *28*(18), 5762–5773. http://riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/index

Umam, K., Hadiyanto, A., & Sukrisno, W. H. (2025). Pertimbangan putusan hakim praperadilan mengenai sah tidaknya penetapan tersangka. *Journal Juridisch, 3*(2), 170–174.

Yusup Supriatna, Hartanto, H., & Wiryadi, U. (2025). Penetapan minimal dua alat bukti dalam menentukan status tersangka melalui praperadilan. *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 3*(4), 4605.

Peraturan Perundang-undangan & Putusan

Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025.

Mahkamah Konstitusi Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 Tentang Penetapan Tersangka, Penggeledahan, Dan Penyitaan Sebagai Bagian Dari Objek Yang Dapat Diuji Melalui Praperadilan.

Website dan Putusan

Ahmad Junaedi. Penguatan Sistem Pembuktian Pidana dalam KUHAP Baru Tantangan dan Implementasi bagi Hakim Peradilan Militer, Badan Strajak Diklat Kumdil, https://suarabsdk.com/penguatan-sistem-pembuktian-pidana-dalam-kuhap-baru-tantangan-dan-implementasi-bagi-hakim-peradilan-militer/, Pada tanggal 12 Juli 2026, Pada Pukul 17.19.

Jennifer Editha and Syarif Nurhidayat. *Urgensi Perluasan Kewenangan Hakim Untuk Memberikan Perintah Penetapan Tersangka Melalui Praperadilan*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, https://law.uii.ac.id/urgensi-perluasan-kewenangan-hakim-untuk-memberikan-perintah-penetapan-tersangka-melalui-praperadilan-2023/, Pada Tanggal 12 Juli 2026, Pukul 12.06.

Muhammad Raihan Nugraha. *Seluk Beluk Praperadilan: Dari Objek Hingga Upaya Hukumnya, Hukum Online*, https://www.hukumonline.com/klinik/a/seluk-beluk-praperadilan-cl7035/, Diakses pada Tanggal 11 Juli 2026, Pada Pukul 21.30.

Norcha Satria Adi Nugroho. Meleburkan Pemeriksaan Upaya Paksa Pada Praperadilan dalam Pemeriksaan Pokok Perkara, Artikel Hukum Online, https://www.hukumonline.com/berita/a/meleburkan-pemeriksaan-upaya-paksa-pada-praperadilan-dalam-pemeriksaan-pokok-perkara-lt68edd52179036/, Diakses Pada Tanggal 14 Juli 2026, Pada Pukul 15.00.

Sari dan Diah Kartika. (2015), Analisis Yuridis Kedudukan Hakim Pemeriksa Pendahuluan sebagai Upaya Pembaharuan Lembaga Praperadilan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Tersedia di: https://www.neliti.com/publications/35454

Taqwaddin Husin. *Alat Bukti Dan Barang Bukti Dalam KUHAP*, Artikel Pengadilan Tinggi Banda Aceh, https://www.pt nad.go.id/new/content/artikel/20220525091259894497854628d90abe4c2e.html, Diakses pada tanggal 12 Juli 2026, Pada Pukul 16.31.

Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 10/Pid.Pra/2024/PN Bdg. Tentang Kewenangan Hakim Praperadilan Dalam Menilai Alat Bukti